MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon: (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 3505193
Laman: *https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id*

SURAT TUGAS
Nomor : 84 /DjMT/Ratgas/KP.01.3/III/2023

Menimbang : Bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI akan melaksanakan Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2023 tentang Pedoman Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dasar : Surat Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 199/Bld.2/Lit/S/3/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Undangan.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Nama : Welly Walbarkah, S.Kom
   NIP : 198507202015031002
   Pangkat : Penata (III/c)
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

2. Nama : Theo Afianto, S.T.
   NIP : 199612112020121005
   Pangkat : Penata Muda (III/a)
   Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Untuk :

1. Melaksanakan tugas untuk menjadi peserta *Focus Group Discussion* (FGD) dalam Penyusunan Naskah Urgensi T.A. 2023 bertempat di Angsana 3 Ballroom lantai 2, Holiday Inn Jakarta Kemayoran Jl. Sunter Agung Utara D2, Jl. Griya Utama No. 1 RW. 5 Sunter Agung, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (14350) pada tanggal 16 Maret 2023;
2. Segala biaya dibebankan pada DIPA Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan TA 2023;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2023

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Lulik Tri Cahyaningrum